

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Gunawan Setiarja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta
- Abdul Mukthi Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta,
- _____, 2004, *Reformasi Konstitusi dalam masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang
- Adnan Buyung Nasution, 1995, *Pemilu Pelanggaran Azas Luber*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Alexei Trochev, 2002, *Implementasi Russian Constitutional Court Decision*, east European Constitutional Review II
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Anwar. C, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK.RI, Jakarta
- Austin Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Yapendo, Bandung
- C.S.T.Kansil, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dahlan thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta
- Dalam Lexy Armanjaya, *Dekonstruksi kewenangan legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) Analisis Sosio –Legal*, Jurnal Konstitusi, Volume 5, Nomor 2, November 2008
- David Held, 2004, *Hasil Terjemahan dalam Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern Hingga pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus besar Bahasa Indonesia Cetakan ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

- Dian Bakti Setiawan ,2011, *Pemberhentian Kepala Daerah* ,Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eddy Asnawi ,2005, *Tinjauan Hukum dan politik kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, dalam *Jurnal Hukum Republica* Fakultas Hukum Unilak, Vol. 4, No.02
- Edy Junaidi, september 2007,” *Judicial review di beberapa negara, suatu kajian perbandingan* “, *Varia Peradilan* , tahun XV No. 172 januari 2000 Dalam Miftahul Huda,” *Ultra Petita dalam pengujian undang-undang* ”, *Jurnal konstitusi*, Volume 4, Nomor 3,
- George Sorensen, 2002, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta
- Henry B. Mayo, 2001, *An introduction to democratis theory* dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Henry Campbell Black, 2004, *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*, West Publishing Co
- Hestu Cipto Handoyo, 2009 *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Indroharto, 1991, *Usaha-usaha Memahami Undang- undang tentang Peradilan TUN*, Sinar Harapan, Jakarta
- Ismail Sunny , *Mekanisme Demokrasi Pancasila* , (jakarta tanpa tahun)
- Isran Noor, *Politik Otonomi daerah untuk mengutamakan NKRI*, Penerbit, Seven Startegic studies,2012
- J. Kristiadi, *Transisi, Koridor Menuju Demokrasi : Catatan Pembuka* , dalam Haramain, A. Malik & M.F. Nurhuda Y
- Jimly Asshiddiqie dalam *Model-Model Pengujian Konsitusional di beberapa Negara*, Jakarta : Konpress, 2005
- _____, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Watampone, Jakarta
- _____, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*, konpress, Jakarta
- _____, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara*, Sekjen dan Kepanitraan MK RI, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, Konstitusi Press, Jakarta

- _____, 2006, *Peradilan di Sepuluh Negara Sekjen & Kepanitraan MK RI*, Jakarta
- Joko Priatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, sistem dan problema penerapan di indonesia*, diterbitkan atas kerja sama antara pustaka pelajar dengan penelitian , pengembangan, dan pengabdian masyarakat (P3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang, Yogyakarta
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah* , PT Alumni, Bandung
- Keith E. Whittington, 1999, *Constitutional Interpretation: textual meaning, Original intent, and Judicial Review*, University Press of Kansas
- KPU, 2005, *Pemilu Legislatif 2004*, KPU, Jakarta
- Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraaan MK RI, Jakarta
- Lodewijk Gultom, 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia* (suatu kajian dari Aspek Tugas dan Wewenang), CV. Utomo, Bandung
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*” ; *Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, Jakarta, 29 Desember 2009
- Malik, 2009, ” Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 Nomor 1, April, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Marsono, 2002, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, Eko Jaya, Jakarta
- Meriam Budiharjo, 1983, *Dasar-dasar ilmu politik* , PT. Gramedia, jakarta
- _____, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Berpolitik*, Gramedia, Jakarta
- Moh Mahfud MD, 2002, *Demokrasi dan konstitusi di indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- _____, *Politik Hukum kewenangan komisi yudisial, dalam buku Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*
- _____, *Berita Makamah Konstitusi* , edisi No.24, Agustus- September 2008
- _____, 2009, dalam buku Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta

- _____, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Muhammad Ridhwan Indra, 1990 *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mukti Aryo , 1984, Mengutip Amir Mahmud “*Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat*” dalam Prisma, LPES, Jakarta
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum sengketa Pemilukada Di Indonesia* (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusional , UII Press, Yogyakarta
- _____, 2010, *Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia* (Gagasan Perluasan kewenangan konstitusi Mahkamah Konstitusi), UII Press, Yogyakarta
- Ni'matul Huda ,2005, *Otonomi Daerah Filosofi , sejarah dan Problematika* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Padmo Wahyono, 1984, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta
- Rachmadi Usman , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan* , Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan. HR , 2011, *Hukum Administrasi Negara* , Rajawali Pers, Jakarta
- Rozali Abdullah , 2007, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saldi Isra, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum Respublikca. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning No.3 Vol.2 (Pekan Baru)Oktober 2002)
- Sarundajang, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung. : Problema dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Satjiptp Raharjo, dalam Khudzaifah Dimiyati (editor), *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
- SF. Marbun , 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Edisi Revisi, FH UII Press, Yogyakarta

Soedarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil pemilu 2004 oleh mahkamah konsitusi* ,Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI pers, Jakarta

Sri Soemantri, 1998, *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan*, FH.Uii, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo,1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Veri Junaidi, *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif penyebab di batalkannya kehendak Rakyat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010*.Jurnal Konsitusi, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010

Wiryo Prodjodikoro,1977, *Asas-asas hukum tata negara di indonesia*, PT. Dian Rakyat, Jakarta

Zulkarnaen Nurdin, 2002, *Hubungan Partai Politik dengan wakilnyadi lembaga Perwakilan*, dalam jurnal hukum, Republica Fakustas Hukum Universitas Lancang Kuning Vol.2 No.3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 02 TAHUN 2005, Tentang Tata Cara pengajuan upaya keberatan terhadap penetapan hasil pilkada

Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-XI/2008, Tentang Permohonan keberatan atas putusan KPU , Provinsi Jawa Timur No.30 tahun 2008 tanggal 11 November tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, tahun 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013, Bagian Duduk Perkara , Sub “B”
Kewenangan Mahkamah Konstitusi point No. 4 dan point No. 5

Litratur Lainnya

Kompas , Cyber Media ;jumat 21 mei 2004.

Koran “ Jawa Pos” ,*Mendagri Ancam Kepala Daerah Tak Netral*“ Sabtu, 12 Juli 2014

Majalah *Legal Review*, No. 49 Tahun 2007

Makalah Untuk Kelengkapan Seleksi Calom Hakim MK , 10 maret 2008

Makalah Untuk Kelengkapan Seleksi Calon Hakim MK , 10 maret 2008 dalam pendapat Ahli pada Putusan Perkara Nomor 10/PUU-I/2008

www.kpu.go.id.

